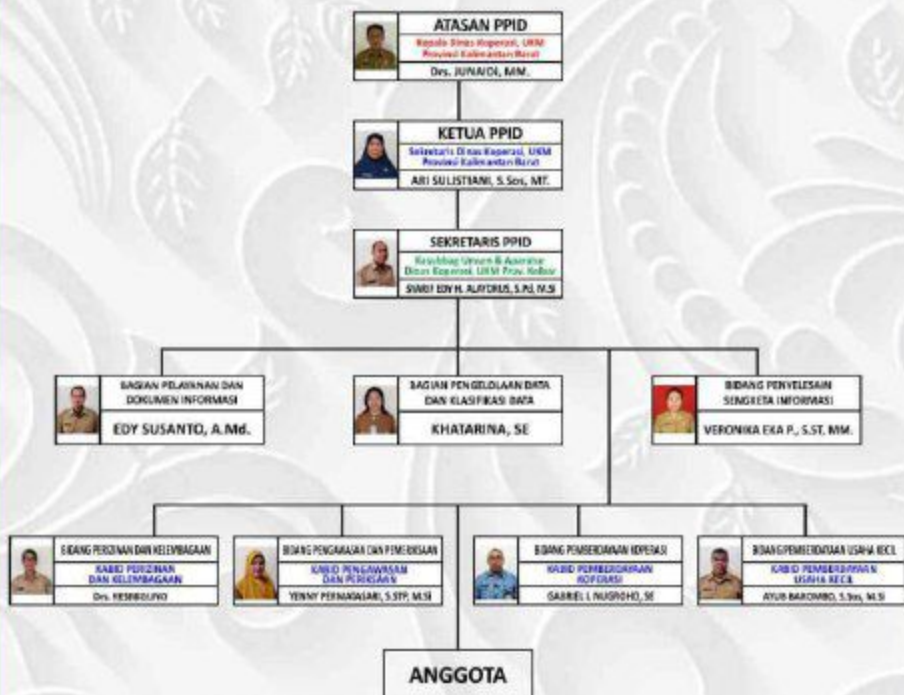




STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT





Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat :

Visi

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan”

Misi

- 1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**
- 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance**
- 3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat**
- 4. Mewujudkan masyarakat sejahtera**
- 5. Mewujudkan masyarakat yang tertib**
- 6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**



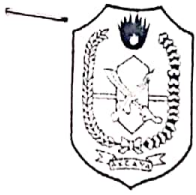
Visi dan Misi PPID Pembantu

Visi

Menjadi penyelenggara layanan Informasi Publik yang unggul di bidang Koperasi dan UKM Kalbar

Misi

- 1. Meningkatkan fasilitas dan pengelolaan layanan Informasi Publik**
- 2. Meningkatkan kualitas layanan Informasi Koperasi dan UKM yang profesional, transparan dan akuntabel**
- 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membuka komunikasi yang baik**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Telepon (0561) 732771, 739684 Fax (0561) 732690
e-mail: diskopukm@kalbarprov.go.id. Website: https://diskopukm.kalbarprov.go.id/

Pontianak

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 20 / DISKOPUKM/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID – PEMBANTU)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan keberlanjutan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan pembentukan struktur pengelolaan pelayanan informasi publik guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pada Pasal 9 Point (C) menyebutkan, bahwa pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu di bentuk PPID-Pembantu untuk setingkat SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) dengan menunjuk pejabat di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat yang dianggap mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 125);
13. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 206);
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 125);
13. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 206);
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penunjukan Pejabat pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
- PERTAMA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pembantu) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. PPID-Pembantu Melaksanakan Tugas:
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
 6. Melakukan inventarisasi informasi yang di kecualkan untuk di sampaikan kepada PPID;
 - b. PPID-Pembantu melaksanakan fungsi:
 1. Penghimpunan Informasi Publik pada masing-masing Unit Kerja
 2. Penataan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing Unit Kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Atasan PPID Pembantu
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 20 /DISKOPUKM/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
 DOKUMENTASI (PPID – PEMBANTU) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
 MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

No	Nama / Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Ketua PPID
3.	Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris PPID
4.	Veronika Eka Purwanti, S.ST, MM <i>Purwati</i>	Koordinator Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi
5.	Katharina, SE	Koordinator Bagian Pengolahan Data dan Klasifikasi Data
6.	Edy Susanto, A. Md	Koordinator Bagian Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
7.	Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan	Bidang Perizinan dan Kelembagaan
8.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	Bidang Pengawasan Koperasi
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	Bidang Pemberdayaan Koperasi
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
11.	Kasubbag. Keuangan dan Asset	Anggota
12.	Julisa Wipasobyta, SE, MM	Anggota
13.	Endang Agustinaningrum, SE	Anggota
14.	Wagiarti, S. Sos	Anggota
15.	Dwi Rahayu Supriyanti, SE	Anggota
17.	Paryanto, SE	Anggota

18.	Henri Wibawa, SE	Anggota
19.	Chairunnisa Qurratul'ain, A. Md.Ak	Anggota
20.	Ari Mutia Sari, A. Md	Anggota
21.	Punguan Sianipar	Anggota
22.	Fathul Junaidi ✕	Anggota
23.	Nurhayati	Anggota
24.	Eggi Juparyatna, S. Pd	Anggota
25.	Romi Hermanto S. Kom	Anggota
26.	Hambali, A. Md	Anggota
27.	Novi Estikawaty, SH	Anggota
28.	Okta Dwi Kusumawardani, SE	Anggota
29.	Intan Maulani, SM ✓	Anggota

Okta Dwi Kusumawardani, SE

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

